

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terletak pada pertemuan dua rangkaian pegunungan muda, yaitu rangkaian Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal tersebut menyebabkan di Indonesia terdapat banyak gunungapi aktif (Kusumadinata dalam Kumalawati, 2014). Indonesia juga terletak di antara 3 (tiga) lempeng bumi yang aktif menyebabkan seringnya terjadi bencana seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami dan longsor. Indonesia bahkan dijuluki sebagai *ring of fire* karena banyaknya gunung berapi yang melingkari wilayah Indonesia (Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 7, 2017).

Indonesia sampai saat ini terdapat 129 gunung berapi yang masih aktif dan 500 gunungapi yang tidak aktif. Gunungapi aktif yang ada di Indonesia merupakan 13 persen dari seluruh gunung berapi aktif di dunia. Sedangkan, 70 gunung di antaranya merupakan gunung berapi aktif yang rawan meletus dan 15 gunung berapi kritis menurut Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (dalam Nurwihastuti et al, 2019).

Gunungapi yang Meletus terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Dari letusan-letusan seperti inilah gunung berapi terbentuk. Letusan gunung berapi bisa menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang besar dan bahkan bisa mempengaruhi putaran iklim di bumi ini. Hasil letusan gunung berapi dapat berupa: gas vulkanik, lava dan aliran pasir serta batu panas, lahar, tanah longsor, gempa bumi, abu letusan dan awan panas (piroklastik) (Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.

7, 2017). Gunungapi meletus merupakan salah satu bencana alam yang serius tidak hanya bagi Indonesia namun juga bagi negara-negara lain. Gunungapi meletus dikatakan bencana jika aktivitas alam tersebut mengganggu kehidupan manusia serta menimbulkan korban jiwa dan kerugian.

Gunung Sinabung adalah salah satu gunung aktif di Indonesia yang telah menimbulkan bencana alam dan korban jiwa berada di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Gunungapi Sinabung kembali erupsi pada tanggal 29 Agustus 2010 yang sebelumnya tidak pernah menampakkan aktivitas letusannya sejak tahun 1600. Pada mulanya gunungapi ini merupakan gunungapi tipe B namun setelah erupsi dan terus mengalami peningkatan aktivitas letusan secara eksplosif berubah menjadi gunungapi tipe A. Gunungapi Sinabung kembali erupsi pada bulan September 2013 dengan intensitas yang terus meningkat, menurut SumutProv 2013 (dalam Nurwihastuti, 2019) Gunungapi Sinabung statusnya dinaikkan menjadi level “awas” pada tanggal 24 November 2013.

Identifikasi bahaya letusan gunungapi dibagi dua berdasarkan waktu kejadiannya, yaitu bahaya utama (*primer*) dan bahaya ikutan (*sekunder*). Kedua jenis bahaya tersebut masing-masing mempunyai risiko merusak dan mematikan. Bahaya utama/*primer* (sering juga disebut bahaya langsung) letusan gunungapi adalah bahaya yang langsung terjadi ketika proses peletusan sedang berlangsung. Jenis bahaya tersebut adalah awan panas (*pyroclastic flow*), lontaran batu (*pijar*), hujan abu lebat, leleran lava (*lava flow*), dan gas beracun.

Bahaya sekunder gunungapi adalah bahaya yang terjadi setelah proses peletusan berlangsung. Bila suatu gunungapi meletus akan terjadi penumpukan material dalam berbagai ukuran di puncak dan lereng bagian atas. Pada saat

musim hujan tiba sebagian material tersebut akan terbawa oleh air hujan dan tercipta adonan lumpur turun ke lembah sebagai banjir bebatuan, banjir tersebut disebut lahar.

Bentuk dari Gunungapi Sinabung adalah gunungapi strato yang memiliki lereng yang curam. Sehingga ketika saat hujan turun mampu memicu terjadinya banjir lahar. Banjir lahar yang terjadi berpotensi menghasilkan tenaga yang cukup besar untuk mengangkut material yang berada pada Gunungapi Sinabung. Material-material yang terangkut oleh banjir lahar dingin berupa pasir, kerikil dan bahkan bongkahan-bongkahan batu yang cukup besar. Fenomena banjir lahar yang mengangkut bongkahan batuan tersebut dapat disaksikan pada wilayah Kecamatan Tiganderket khususnya di daerah: a) Desa Perbaji, b) Desa Sukatendel, dan c) Desa Kutambaru.

Desa Perbaji, Desa Sukatendel, dan Desa Kutambaru merupakan tiga desa yang terdampak langsung oleh bencana banjir lahar. Dampak yang dialami dari bencana banjir lahar cukup parah. Rumah, ladang, jalan serta jembatan tertimbun oleh material yang berupa batu, pasir dan kerikil yang dibawakan melalui aliran banjir lahar. Ancaman bencana banjir lahar Gunungapi Sinabung telah menyebabkan satu orang meninggal dunia, satu orang menghilang serta empat orang luka ringan akibat terbawa arus banjir lahar (BNPB, 2016).

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (UU RI No.24 Tahun 2007). Sedangkan Kesiapsiagaan menurut Carter (1991) dalam Khaira (2010) adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan, organisasi, masyarakat, komunitas,

dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna. Termasuk kedalam tindakan kesiapsiagaan adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan dan pelatihan personil. Tanggung jawab untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana dapat berbentuk kesiapsiagaan (*preparedness*), yaitu: tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan, organisasi, masyarakat, komunitas, dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna (Carter, 1991 dalam Khaira, 2010)

Ada 7 (tujuh) *stakeholders* yang berkaitan erat dengan kesiapsiagaan masyarakat, yaitu: individu/rumah tangga, instansi pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan bencana, komunitas sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelembagaan masyarakat, kelompok profesi dan pihak swasta. Dari ke tujuh *stakeholders* tersebut, tiga *stakeholders*, yaitu: rumah tangga, pemerintah, dan komunitas sekolah, disepakati sebagai *stakeholders* utama, dan empat *stakeholders* lainnya sebagai *stakeholders* pendukung dalam kesiapsiagaan bencana (LIPI, 2006). Namun, di dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada *stakeholders* yang pertama yaitu individu atau rumah tangga, alasan dari pembatasan dari *stakeholders* dikarenakan searah dengan rumusan masalah yakni tingkat kesiapsiagaan masyarakat di wilayah Tiganderket dalam menghadapi bencana banjir lahar khususnya di: a) Desa Perbaji, b) Desa Sukatendel, dan c) Desa Kutambaru.

Tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dapat ditentukan dengan alat ukur kesiapsiagaan. Sejak tahun 2006, alat ukur kesiapsiagaan tersebut digunakan dalam kajian kesiapsiagaan masyarakat

mengantisipasi bencana alam di beberapa daerah di Indonesia. Kajian tingkat kesiapsiagaan masyarakat menggunakan *framework* yang dikembangkan LIPI bekerja sama dengan UNESCO/ISDR pada tahun 2006.

Pengetahuan terkait dengan persiapan menghadapi bencana pada kelompok rentan bencana menjadi fokus utama. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa kesiapan menghadapi bencana ini seringkali terabaikan pada masyarakat yang belum memiliki pengalaman langsung dengan bencana (Priyanto, 2006). Keluarga diharapkan memiliki kemampuan untuk mengatasi banjir, karena peran keluarga dalam kesiapsiagaan sangat penting alasannya kepala keluarga berperan dalam menyampaikan informasi bagi keluarganya mengambil keputusan yang cepat dapat mempengaruhi anggota keluarganya dan juga kepala keluarga sebagai sumber dukungan sosial bagi keluarganya, akibat pengaruhnya semua ucapan, tingkah laku dan tindakannya akan dijadikan panutan oleh keluarganya (Effendi, 2009).

Kemampuan yang harus dimiliki kepala keluarga sebagai wujud dari kesiapsiagaan adalah mempunyai pengetahuan dan sikap terhadap bencana seperti ketrampilan pertolongan pertama, menggerakkan anggota keluarga untuk mengikuti latihan dan keterampilan evakuasi, menyiapkan kebutuhan makanan yang dapat disimpan dan tahan lama, menyiapkan kotak P3K di rumah (LIPI, 2006). Berdasarkan latar belakang di atas dan karena pentingnya mengkaji permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian perihal mitigasi bencana berupa analisis tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir lahar Gunungapi Sinabung untuk mengantisipasi korban dari bencana banjir lahar Gunungapi Sinabung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka identifikasi masalah ini adalah:

1. Kegiatan penanggulangan bencana dapat berbentuk kesiapsiagaan (*preparedness*), yaitu: tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan, organisasi, masyarakat, komunitas, dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna.
2. Minimnya pengetahuan untuk memulai gerakan siaga bencana yang lebih terlembaga dalam masyarakat adalah salah satu penyebab utama korban akibat bencana.
3. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dapat ditentukan dengan alat ukur kesiapsiagaan.
4. Alat ukur kesiapsiagaan tersebut digunakan dalam kajian kesiapsiagaan masyarakat mengantisipasi bencana alam di beberapa daerah di Indonesia.

C. Batasan Masalah

Masalah penelitian dibatasi hanya tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir lahar di Gunungapi Sinabung. Berdasarkan lima parameter yaitu: a) pengetahuan dan sikap tentang risiko; b) kebijakan dan panduan; c) tanggap darurat; d). sistem peringatan bencana; e) mobilisasi sumberdaya.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir lahar Gunungapi Sinabung?

2. Bagaimana kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi bencana banjir lahar Gunungapi Sinabung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir lahar Gunungapi Sinabung sehingga bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam membuat kebijakan.
2. Mengetahui kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi bencana banjir lahar Gunungapi Sinabung.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini dijadikan sebagai prasyarat dalam menyelesaikan Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Medan.
2. Sebagai bahan Informasi dan wawasan bagi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir lahar Gunungapi Sinabung.
3. Membantu kontribusi dalam penentuan kebijakan, perencanaan dalam manajemen bencana alam di lokasi yang terdampak banjir lahar Gunungapi Sinabung.